

Open-Book Exam

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2018/2019

Matakuliah : Sistem Ekonomi (ECEU602005)
 Dosen : Sri-Edi Swasono dan Agus Salim
 Tanggal : 21 Mei 2019
 Waktu : 2 1/2 jam

Jawaban Saudara ditulis dengan baris renggang (2 spasi/dua garis). Tulisan harus jelas.

Pilih 4 dari 8 pertanyaan. No. 1 wajib dipilih.

1. Pertanyaan No. 1: berilah komentar terhadap Bagan Induk di bawah ini dalam kaitan dengan evaluasi permasalahan sistem ekonomi Indonesia.

BAGAN INDUK: SISTEM EKONOMI
 EKONOMI LIBERALISME VERSUS EKONOMI PANCASILA/DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

Konvensional: Neoclassical Economics Neoliberalisme/Kapitalisme	Kontemporer: Pancasila Economics Demokrasi Ekonomi Indonesia Pasal 33 UUD 1945
KOMPETITIVISME	KOOPERATIVISME
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Liberalism/Asas Kebebasan Pribadi</i> • <i>Individualism/Asas Perorangan</i> • <i>Self-interest</i> • <i>Competitive-based economics</i> • <i>Competitivism/Kompetitivisme</i> • <i>Free-fight Competition</i> • <i>Daya-Saing, (ext.) the winner-take-all</i> • <i>Market-sovereignty/“Daulat-Pasar”</i> <i>(free-market, market-sovereignty)</i> • <i>Pursuing economic utility: profit and material satisfaction</i> • <i>Homo-Economicus</i> • <i>Self-interest-centered</i> Mengutamakan kepentingan/ pamrih pribadi • <i>Capital-centered</i> Mengutamakan Modal (modal sentral-substansial) • <i>Maximum private corporation gain</i> Maksimum Keuntungan Individu • <i>Exploitative economics/rentseeking</i> Eksploitasi Ekonomi (sistem ekonomi subordinasi) • <i>Individual-based business ownership</i> Pemilikan Bisnis Berbasis Individual • <i>Social Ideology: Charity, Altruisme-Philanthropy</i> Ideologi Sosial: caritas, filantropi 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Asas Kebersamaan/Mutualism</i> • <i>Asas Kekeluargaan/Brotherhood</i> • <i>Mutual-interest</i> • <i>Cooperation-based economics</i> • <i>Cooperativism/Kooperativisme</i> • <i>Cooperation, treaty, alliance</i> • <i>Daya-Kerjasama Sinergis</i> • <i>People-sovereignty/ “Daulat-Rakyat”</i> <i>(state intervention, people-sovereignty).</i> • <i>Pursuing economic, social, moral and ethical utilities</i> • <i>Homo-Humanus</i> • <i>Homo-Socious</i> • <i>Homo-Ethicus</i> • <i>Homo-Religious</i> • <i>Homo-Digitalis</i> • <i>Homo-Magnificus</i> • <i>Mutual-interest-centered</i> Mengutamakan kepentingan bersama/kepentingan sosial • <i>People-centered, people-based</i> Mengutamakan Manusia (manusia sentral-substansial) • <i>Maximum societal welfare</i> Maksimum Kesejahteraan Sosial • <i>Economic Democracy/Demokrasi Ekonomi</i> (partisipasi-emansipasi ekonomi, <i>grass-roots economy</i>) • <i>Stake-holder-based business ownership – co-ownership, co-determination, co-responsibility</i> Pemilikan Bisnis Berbasis Kebersamaan/Publik (<i>Triple-Co</i>) • <i>Social Ideology: Social/Citizen Rights</i> Ideologi Sosial: hak-hak sosial rakyat

2. Data terakhir HDI 2018 tertinggi ditempati oleh Norwegia sebesar 0.953, sementara itu HDI Indonesia sebesar 0.694, dan berada pada urutan 116 (dari 189 negara di dunia). Negara-negara yang mengelilingi Indonesia seperti Malaysia pada urutan 57 (HDI 0.802); Brunei Darussalam pada urutan 39 (HDI 0.853); Singapura pada urutan 9 (HDI 0.932); dan Australia pada urutan 3 (HDI 0.938). Sementara itu dari laporan Kebahagiaan Dunia (Human Happiness Index/HHI) 2016 Denmark menempati angka tertinggi, urutan pertama dari 157 bangsa (7.526 – *the most happiest nation in the world*). Indonesia berada

pada urutan 79 (5,314), Australia pada urutan 9 (7,313), Singapura pada urutan 22 (6,739), Malaysia pada urutan 47 (6,005) Banyak yang menilai bahwa rendahnya HDI Indonesia berkaitan dengan tidak konsekuennya Indonesia melaksanakan sistem ekonomi berdasar Konstitusi kita, melanggar imperativisme dan normativisme Konstitusional.

Apa pendapat Saudara dan Jelaskan.

3. Kelebihan dari seorang ekonom dapat dikatakan karena pemahamannya mengenai konsepsi "*opportunity cost*". Tentu lebih hebat lagi kalau sang ekonom itu memahami Pembangunan Nasional meliputi pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan ketahanan nasional.

Jelaskan apa itu *opportunity cost* dan contoh kasusnya yang diterapkan pada Pembangunan Nasional.

4. Semenjak Samuel Huntington menyatakan bahwa ***culture matters*** (Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York: Simon and Schuster, 1996, hlm. 68), dan kemudian juga didukung oleh Amartya Sen bahwa ***culture does matter*** (World Culture Congress, Bali, 2013), dengan contoh-contoh kemajuan ekonomi Jepang dan Korea Selatan, maka makin keras dorongan tentang pentingnya menempatkan peran strategis *socio-cultural capital*. Di situ kasus Robinson Crusoe (yang digubah/dirubah dari karya asli Daniel Dafoe, 1917) penting untuk diresapi. Disayangkan para ekonom Indonesia belum sepenuhnya menaruh perhatian pada peran strategisnya *socio-cultural capital* dan masih berorientasi baku pada *econo-financial capital*, sehingga Indonesia belum berhasil mengatasi berbagai ketergantungannya pada luar-negeri, rendahnya HDI dan HHI sebagaimana disebut pada pertanyaan No. 2 di atas.

Berilah komentar dan jelaskan.

5. Ekonomi rakyat adalah riil dan konkret. Ekonomi rakyat adalah sesuai dengan ideologi nasional bahwa rakyatlah yang berdaulat sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Secara strategis pilihan pendekatan pembangunan untuk ekonomi rakyat adalah *people-based* dan *people-centered*.

Jelaskan tentang peranan ekonomi rakyat.

6. (Yang sudah memilih pertanyaan No. 5 tidak diperkenankan memilih pertanyaan No. 6 ini).

Pandangan mengenai mekanisme *trickle-down effect* sangat menjerumuskan, lagi pula secara moral harus ditolak karena menempatkan rakyat di bawah hanya sebagai penerima rembesan (*spill-over*) pendapatan pemodal besar di atas. Ekonomi rakyat justru yang mensubsidi perekonomian besar di atas, artinya yang terjadi adalah mekanisme *trickle-up effect*.

Jelaskan.

7. Menurut Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto (2019), Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang bersumber dan berdasar pada Pancasila baik sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) maupun sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*). Ekonomi Pancasila telah terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya, yang merupakan sokoguru dari Konstitusi dan perekonomian kita. Tanpa *Penjelasan*-nya, kita tidak dapat memaknai Pasal 33 UUD 1945 secara sempurna, sehingga tanpa pencabutan secara tegas *Penjelasan* Pasal 33 UUD 1945 tetap mempunyai daya laku (*validity*) dan tetap mempunyai daya guna (*efficacy*) dalam penyelenggaraan pemerintah untuk menciptakan negara yang sejahtera.

(1). Berilah komentar mengenai rumusan Ekonomi Pancasila di atas.

(2). Khusus dikemukakan oleh Prof. Maria bahwa tanpa *Penjelasan* kita tidak dapat memaknai Pasal 33 UUD 1945.

8. Bagaimana menjawab bahwa "bunga" atau *interest rate* (i) tidak selalu harus diartikan sebagai "riba".

Jelaskan.